

**PENGARUH PAD, DANA PERIMBANGAN, SILPA, KEMISKINAN DAN  
PENGANGGURAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL  
INTERVENING (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI  
SUMATERA SELATAN)**

**Verawaty**

Universitas Bina Darma  
verawaty@binadarma.ac.id

**Siti Salwa**

Universitas Bina Darma  
salwasiti302@gmail.com

**ABSTRACT**

*Human development is a process of expanding choices for humans, especially in accessing development results and achieving human development goals. This can be seen from the HDI. This study aims to analyze PAD, DAU, DAK, DBH, SilPA, Poverty and Unemployment which affect HDI through capital expenditure as an intervening variable. This study used path analysis with SPSS and the Sobel test. The results of the study, namely PAD and unemployment have a significant effect on HDI. DAU, DAK, DBH, SiLPA, Poverty have no significant effect on HDI. DAK, DBH, Poverty have a significant effect on Capital Expenditures and PAD have no significant effect on Capital Expenditures. DAU SiLPA, unemployment has no significant effect on capital expenditure but capital expenditure does not intervene in all research variables. From the results of the conclusion, the government pays more attention to efforts to increase the HDI both through capital expenditure and other fund allocations.*

**Keywords:** *IPM, Balancing Fund, Poverty, Unemployment, Capital Expenditure*

**ABSTRAK**

Pembangunan manusia adalah sebuah proses perluasan pilihan bagi manusia, khususnya dalam mengakses hasil pembangunan dan tercapainya tujuan pembangunan manusia ini dapat ditinjau dari IPM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis PAD, DAU, DAK, DBH, SilPA, Kemiskinan dan Pengangguran yang mempengaruhi IPM melalui belanja modal sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan analisis jalur dengan SPSS dan uji sobel. Hasil penelitian yaitu PAD dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM. DAU, DAK, DBH, SiLPA, Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. DAK, DBH, Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal. DAU SiLPA, Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal namun

Belanja Modal tidak mengintervensi seluruh variabel penelitian. Dari hasil kesimpulan pemerintah lebih memperhatikan upaya peningkatan IPM baik dari melalui belanja modal maupun alokasi dana lainnya.

**Kata Kunci:** IPM, Dana Perimbangan, Kemiskinan, Pengangguran, Belanja Modal

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan proses yang dilakukan secara berkesinambungan bagi perbaikan taraf hidup masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, menjalankan kehidupan yang produktif serta perluasan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. Salah satu komponen yang memegang peranan vital dalam pembangunan suatu negara adalah manusia (Verawaty dkk., 2020). Pembangunan manusia adalah sebuah proses perluasan pilihan bagi manusia, khususnya dalam mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan (Dewi, 2017). Tercapainya tujuan pembangunan manusia ini dapat ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengertian IPM yang dikeluarkan oleh UNDP yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Fenomena saat ini adalah seiring dengan melambatnya IPM nasional, pada tahun 2020 terdapat 10 provinsi yang mengalami penurunan IPM dengan sebab utamanya karena penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Berikut ini data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020.

Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>IPM(%)</b>	<b>Kategori</b>
1.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	69,32	Sedang
2.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	69,28	Sedang
3.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	65,30	Sedang
4.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	66,32	Sedang
5.	Kabupaten Ogan ilir	67,06	Sedang
6.	Kabupaten Muara Enim	68,74	Sedang

7.	Kabupaten Lahat	67,44	Sedang
8.	Kabupaten Musi Rawas	66,79	Sedang
9.	Kabupaten Musi Banyuasin	67,69	Sedang
10.	Kabupaten Banyuasin	66,74	Sedang
11.	Kabupaten Empat Lawang	65,25	Sedang
12.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	64,70	Sedang
13.	Kabupaten Musi Rawas Utara	64,49	Sedang
14.	Kota Palembang	78,33	Sedang
15.	Kota Prabumulih	74,55	Sedang
16.	Kota Pagar Alam	68,31	Sedang
17.	Kota Lubuk Linggau	74,78	Sedang
Sumatera Selatan		70,01	Sedang

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa IPM Provinsi Sumatera Selatan belum memperlihatkan nilai yang optimal karena nilainya masih jauh dari angka 100. Melihat kondisi tersebut, bila dibandingkan dengan DKI Jakarta (80,77%) sedangkan Provinsi Sumatera Selatan (70,01%) seharusnya IPM Provinsi Sumatera Selatan harus ditingkatkan. Risdiana, (2020) menyebutkan, IPM di suatu daerah akan meningkat apabila ketiga unsur (kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan/ ekonomi) dapat ditingkatkan. Verawaty dkk. (2021) juga menyebutkan untuk meningkatkan pembangunan manusia yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di suatu daerah maka diperlukan dana anggaran pembangunan khusus untuk daerah tersebut yang berkaitan dengan desentralisasi ekonomi (otonomi daerah).

## TELAAH LITERATUR

Teori keagenan (*Agency Theory*) adalah hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) terlibat dengan orang lain (*agent*) untuk melakukan pelayanan kepada mereka yang melibatkan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen. (Jensen dan Meckling 1976 dalam Afif & Yulianti, 2019). Teori *fiscal federalism* dibedakan menjadi dua perspektif. Pertama, teori tradisional yang menekankan keuntungan alokatif dari desentralisasi (Hayek 1945 dalam Wertianti & Dwirandra, 2013). Kedua, teori perspektif baru dikemukakan yang menekankan pada bagaimana kebijakan desentralisasi fiskal mempengaruhi perilaku pemerintah daerah (Musgrave 1959

dan Oates 1972 dalam Wertianti & Dwirandra, 2013). Sinuraya (2020) pengertian IPM sebagai salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia, dihitung dari data yang dapat menggambarkan empat komponen. Belanja modal adalah salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi dimana pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran ini dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan (Komariah dkk., 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang murni dihasilkan daerah dengan mengoptimalkan sumber potensi dari pengelolaan kekayaan asli daerah dan partisipasi masyarakat daerah yang terdiri dari atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah (Verginia 2017 dalam Amalia & Haryanto, 2019). DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Talangamin dkk., 2019). DAK berdasarkan UU No.15 Tahun 2017 ialah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan kepentingan daerah yang sesuai dengan prioritas daerah (Fathia & Rusdi, 2020). Menurut UU No. 15 Tahun 2017, DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. DBH terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam (Fathia & Rusdi, 2020). Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan (SAP, 2021). Novriansyah, (2018) menjelaskan kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang

tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan dan juga secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan (Fahri dkk., 2020).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Populasi pada penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan melaporkan data PAD, DAU, DAK, DBH, SiLPA, Kemiskinan, Pengangguran dan data Indeks Pembangunan Manusia serta belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 kabupaten/kota. Data yang digunakan diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan DJPK Departemen Keuangan. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *sampling jenuh*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data tidak langsung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PAD, DAU, DAK, DBH, SiLPA, Angka Kemiskinan dilihat dari persentase penduduk miskin, Pengangguran dari tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2016-2020. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang digunakan mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam sebuah populasi dalam penelitian ini. Teknik analisis kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis dari objek yang diteliti dengan menggabungkan hubungan antar variabel yang terlibat di dalamnya. Teknik analisis data pada penelitian ini dimulai dari analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji sobel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah dilakukan outlier dari 85 sampel, 19 data dinyatakan sebagai data outlier. Semua variabel penelitian telah lolos uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas, yaitu nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dengan seluruh variabel di atas  $\alpha = 0,05$  yang berarti data yang diuji terdistribusi normal. Pada hasil uji run test penelitian ini, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi Hasil uji multikolinearitas

menyatakan nilai tolerance untuk seluruh variabel lebih besar dari 10% dan VIF lebih kecil dari 10 yang berarti bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menyatakan nilai signifikansi untuk setiap variabel bebas terhadap nilai absolute residual lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Dengan demikian semua variabel penelitian bisa diuji pada tahapan selanjutnya. Berikut hasil regresi untuk persamaan substruktural I dan II:

Tabel 2 Analisis Regresi untuk persamaan substruktural I

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,440	3,988		1,364	,178
	PAD	-,098	,103	-,145	-,953	,345
	DAU	,249	,237	,233	1,048	,299
	DAK	,274	,163	,319	1,679	,099
	DBH	,388	,101	,476	3,821	,000
	SiLPA	-,059	,025	-,249	-2,390	,020
	Kemiskinan	,438	,214	,223	2,044	,045
	Pengangguran	-,087	,132	-,074	-,663	,510
a. Dependent Variable: Belanja Modal						

Tabel 3 Analisis Regresi untuk persamaan substruktural II

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,996	,477		10,465	,000
	PAD	,052	,012	,573	4,230	,000
	DAU	-,045	,028	-,313	-1,586	,118
	DAK	,016	,020	,143	,832	,409
	DBH	-,011	,013	-,098	-,798	,428
	SiLPA	-,002	,003	-,072	-,749	,457
	Kemiskinan	-,066	,026	-,251	-2,528	,014
	Pengangguran	,069	,016	,437	4,449	,000
	Belanja Modal	-,034	,015	-,252	-2,183	,033
a. Dependent Variable: IPM						

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda berdasarkan data yang ada pada penelitian ini maka nilai-nilai koefisien jalur beta dari hasil uji analisis persamaan substruktural pertama dan persamaan substruktural kedua.

Tabel 4 Pengaruh Variabel Pada Analisis Jalur

Jalur	Pengaruh langsung (direct effect)	Pengaruh tidak langsung (indirect effect)	Pengaruh total (total effect)	Keterangan
X1→Y2	-0,145		-0,145	X1=PAD X2=DAU X3=DAK X4=DBH X5=SiLPA X6= Kemiskinan X7=Pengangguran Y1=IPM Y2=Belanja Modal
X2→Y2	0,233		0,233	
X3→Y2	0,319		0,319	
X4→Y2	0,476		0,476	
X5→Y2	-0,249		-0,249	
X6→Y2	0,223		0,223	
X7→Y2	-0,074		-0,074	
X1→Y1	0,573		0,573	
X2→Y1	-0,313		-0,313	
X3→Y1	0,143		0,143	
X4→Y1	-0,098		-0,098	
X5→Y1	-0,072		-0,072	
X6→Y1	-0,251		-0,251	
X7→Y1	0,437		0,437	
Y2→Y1	-0,252		-0,252	
X1→Y2→Y1	0,573	0,03654	0,60954	
X2→Y2→Y1	-0,313	-0,058716	-0,371716	
X3→Y2→Y1	0,143	-0,080388	0,062612	
X4→Y2→Y1	-0,098	-0,119952	-0,217952	
X5→Y2→Y1	-0,072	-0,062748	-0,009252	
X6→Y2→Y1	-0,251	-0,058716	-0,309716	
X7→Y2→Y1	0,437	0,018648	0,455648	

Signifikan atau tidak pengaruh mediasi dapat diuji dengan *Metode Product of Coefficient*. Metode *Product of Coefficient* dapat dilakukan dengan menggunakan uji sobel. Hasil uji *sobel test* memberikan nilai estimasi *indirect effect* yang kemudian dicari nilai z hitungnya dengan cara membagi besarnya nilai data terhadap nilai standar *error* dan membandingkan dengan z tabel sebesar 1,96.

$$z = \frac{ab}{s_{ab}}$$

$$s_{ab} = \sqrt{b^2sa^2 + a^2sb^2 + sa^2sb^2}$$

Tabel 5 Hasil *Sobel Test*

	Z hitung
PAD	0.877
DAU	-0.953
DAK	-1.350
DBH	-1.952

SiLPA	1.634
Kemiskinan	-1.519
Pengangguran	0.632

*Sumber: Data diolah, 2022*

### **Pengaruh PAD, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal**

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel PAD sebesar  $= 0,000$  lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar  $0,01$  ( $\alpha=1\%$ ) dan nilai t hitung  $= 2,044 > t$  tabel  $= 1,672$  yang berarti bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adiputra dkk. (2015), namun berbeda dengan penelitian Kurniasari (2021). PAD digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan maka semakin besar PAD akan semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunannya sehingga meningkatkan nilai IPM. Dengan demikian, hipotesis 1a yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IPM diterima. Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel PAD sebesar  $0,011$  lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar  $0,05$  ( $\alpha=5\%$ ) dan nilai t hitung  $= -0,953 < t$  tabel  $= 1,671$  yang berarti bahwa PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Patadang dkk. (2021), namun bertolak belakang dengan penelitian Heliyanto & Handayani (2016). Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa salah satu sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah untuk membiayai belanja daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, hipotesis 1b yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal ditolak. Pada uji sobel untuk melihat pengaruh belanja modal dalam mengintervensi PAD terhadap IPM didapatkan hasil z hitung yaitu  $0,877$  lebih kecil dari z tabel dengan tingkat signifikansi  $0,05$  yaitu sebesar  $1,96$ , maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak mengintervensi pengaruh PAD terhadap IPM. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Melgiana dkk. (2020) namun berbeda dengan penelitian Raviyanti dkk. (2017) bahwa PAD berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia melalui alokasi belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa PAD secara langsung dapat meningkatkan IPM tanpa dialokasikan melalui belanja modal. Dengan demikian, hipotesis 1c yang menyatakan bahwa belanja modal mengintervensi PAD terhadap IPM ditolak

### **Pengaruh DAU, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal**

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel DAU sebesar 0,118 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) dan nilai t hitung =  $-1,586 < t$  tabel = 1,672 yang berarti bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Adiputra dkk. (2015), namun berbeda dengan penelitian Verawaty dkk. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum tepat sasaran dalam pengalokasian Dana alokasi Umum sehingga perlu adanya petunjuk maupun pengawasan lebih mendalam agar Dana bagi hasil ini berdampak pada peningkatan IPM. Dengan demikian, hipotesis 2a yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap IPM ditolak. Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel DAU adalah 0,299 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) dan nilai t hitung =  $1,048 < t$  tabel = 1,671 yang berarti bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Adiputra dkk. (2015) berbeda dengan hasil penelitian Raviyanti dkk. (2017). Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Undang-Undang Nomor 33 Pasal 5 Tahun 2004 tentang sumber pendanaan pemerintah daerah dalam APBD yaitu DAU digunakan untuk membiayai belanja daerah yang salah satunya adalah belanja modal. Dengan demikian, hipotesis 2b yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal ditolak. Pada uji sobel nilai z hitung yaitu  $-0.953$  lebih kecil dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96. Maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak mengintervensi pengaruh DAU terhadap IPM. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Melgiana et al. (2020) namun berbeda dengan penelitian Raviyanti et al. (2017). Hasil ini tidak sejalan dengan pernyataan penelitian Raviyanti et al (2017) bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk membiayai belanja modal untuk membangun sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memajukan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hipotesis 2c yang menyatakan bahwa belanja modal mengintervensi DAU terhadap IPM ditolak.

### **Pengaruh DAK, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal**

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel DAK adalah 0,409 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) dan nilai t hitung = 0,832 < t tabel = 1,672 yang berarti bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM. Penelitian Kurniasari (2021) juga menemukan hasil bahwa tidak ada pengaruh signifikan dan negatif antara DAK dan IPM, berbeda dengan hasil penelitian Wahyu & Dwirandra (2015). DAK yang tinggi tidak serta-merta dapat meningkatkan IPM. Dengan demikian, hipotesis 3a yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap IPM ditolak. Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel DAK adalah 0,004 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,01 ( $\alpha=1\%$ ) dan nilai t hitung = 1,679 > t tabel = 1,671 yang berarti bahwa DAK berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Konsisten dengan hasil penelitian Melgiana dkk. (2020) namun berbeda dengan Heliyanto & Handayani (2016). Dari hasil tersebut sesuai dengan pendapat Kementerian Dalam Negeri dalam artikel Dana Perimbangan, Sumber Pendapatan Daerah Terbesar (2013) menunjukkan efektifitas dan optimalisasi penggunaan dana perimbangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan daerah khususnya belanja daerah. Dengan demikian, hipotesis 3b yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal diterima. Pada uji sobel nilai z hitung yaitu -1,350 lebih kecil dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak mengintervensi pengaruh DAK terhadap IPM. Hasil penelitian ini sejalan dengan Verawaty dkk. (2020), namun berbeda dengan penelitian Raviyanti dkk. (2017). DAK pada Provinsi Sumatera Selatan tidak dialokasikan untuk Belanja Modal yang bertujuan untuk meningkatkan IPM melalui indikatornya seperti bidang pendidikan dan kesehatan, melainkan dialokasikan untuk belanja lainnya, seperti bidang infrastruktur, kelautan dan perikanan serta prasarana pemerintah. Dengan demikian, hipotesis 3c yang menyatakan bahwa belanja modal mengintervensi DAK terhadap IPM ditolak.

### **Pengaruh DBH, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal**

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel DBH adalah 0,428 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) nilai t hitung =  $-0,798 < t$  tabel = 1,672 yang berarti bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM. Hasil ini sesuai dengan penelitian Adiputra dkk. (2015) namun berbeda dengan Verawaty dkk. (2020). Hasil ini tidak sejalan dengan pendapat Williantara dan Budiasih, 2016 dalam Patadang dkk, (2021) yang menyatakan DBH memiliki potensi yang cukup tinggi terhadap pendapatan suatu daerah sehingga dapat membiayai belanja daerah dengan baik yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Namun pada penelitian di Sumatera Selatan ini DBH tidak semerta-merta dapat meningkatkan IPM. Dengan demikian, hipotesis 4a yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh negatif terhadap IPM diterima. Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel DBH adalah 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,01 ( $\alpha=1\%$ ) dan nilai t hitung =  $3,821 > t$  tabel = 1,671 yang berarti bahwa DBH berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian Rizki Kurniasari (2021) namun berbeda dengan hasil penelitian Verawaty, Rolia Wahasusmiah dan Amnah (2020), Firnandi Heliyanto dan Nur Handayani (2016), dan Susanti dan Fahlevi (2016). Hasil ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkan DBH yang besar akan memiliki belanja modal yang besar pula. Dengan demikian, hipotesis 4b yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh negatif terhadap belanja modal ditolak. Pada uji sobel nilai z hitung yaitu -1,952 lebih kecil dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mampu membuktikan belanja modal tidak mengintervensi pengaruh DBH terhadap IPM. Hal ini sesuai dengan penelitian Adiputra dkk. (2015) dan tidak signifikan pada penelitian Verawaty dkk. (2017). Hasil penelitian ini tidak sejalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa salah satu dari sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah untuk mendanai belanja daerah adalah DBH. Dengan demikian, hipotesis 4c yang menyatakan bahwa belanja modal tidak mengintervensi DBH terhadap IPM diterima.

### **Pengaruh SiLPA, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal**

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel SiLPA adalah 0,457 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) dan nilai t hitung =  $-0,749 < t$  tabel = 1,672 yang berarti bahwa SiLPA tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Verawaty dkk. (2020) dan berbanding terbalik dengan penelitian Wahyu & Dwirandra (2015). SiLPA memungkinkan adanya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM namun dana tersebut harus dialokasikan untuk sektor-sektor yang dapat meningkatkan IPM seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, hipotesis 5a yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh negatif terhadap IPM diterima. Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel SiLPA adalah 0,020 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) dan nilai t hitung =  $-2,390 < t$  tabel = 1,671 yang artinya SiLPA berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Indiyanti & Rahyuda (2018) namun sejalan dengan penelitian Verawaty dkk. (2020). Hasil ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tidak menggunakan SiLPA secara maksimal seperti fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, salah satunya untuk membantu mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung seperti belanja modal sehingga pembangunan daerah yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya ataupun yang telah direncanakan pada tahun yang bersangkutan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, hipotesis 5b yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh negatif terhadap belanja modal diterima. Pada uji sobel nilai z hitung yaitu 1,634 lebih kecil dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak mengintervensi pengaruh SiLPA terhadap IPM. Konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Verawaty dkk. (2020) namun berbeda dengan hasil penelitian Adiputra dkk. (2015). Konsisten dengan pendapat Verawaty dkk. (2020) menyebutkan SiLPA pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tidak menjadi sumber penerimaan pembiayaan dalam mendukung pembangunan daerah karena memiliki sumber pendanaan lain seperti PAD, DAU, dan DBH. Dengan demikian,

hipotesis 5c yang menyatakan belanja modal tidak mengintervensi SiLPA terhadap IPM diterima.

### **Pengaruh Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal**

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel Kemiskinan adalah 0,014 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) dan nilai t hitung =  $-2,528 < t$  tabel = 1,672 yang berarti bahwa Kemiskinan berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif Kemiskinan terhadap IPM seperti pada penelitian Kiha dkk. (2021) dan tidak sejalan dengan hasil penelitian. Sinuraya (2020). Dengan demikian, hipotesis 6a yang menyatakan bahwa Kemiskinan berpengaruh positif terhadap IPM ditolak. Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel Kemiskinan adalah 0,045 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) nilai t hitung =  $2,044 > t$  tabel = 1,671 yang berarti bahwa Kemiskinan berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Susilowati dkk. (2017), menyebutkan bila semakin besar pengeluaran anggaran dalam belanja modal maka akan menurun angka kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis 6b yang menyatakan bahwa Kemiskinan berpengaruh positif terhadap belanja modal diterima. Pada uji sobel nilai z hitung yaitu -1.519 lebih kecil dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak mengintervensi pengaruh Kemiskinan terhadap IPM. Kemiskinan diduga dapat menjadi disparitas dalam peningkatan IPM karena mampu menghambat seseorang untuk mendapatkan tingkat pendidikan dan kesehatan yang layak sehingga tidak ada peningkatan pada sumber daya manusia (Ningrum dkk., 2020). Sehingga tidak perlu adanya pengaruh belanja modal antara Kemiskinan dengan peningkatan IPM. Dengan demikian, hipotesis 6c yang menyatakan bahwa belanja modal mengintervensi Kemiskinan terhadap IPM ditolak.

### **Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal**

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel Pengangguran adalah 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,01 ( $\alpha=1\%$ )  $t_{hitung} = 4,449 > t_{tabel} = 1,672$  yang berarti Pengangguran berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sinuraya (2020), namun tidak sesuai dengan hasil penelitian Kiha dkk. (2021). Sejalan dengan pendapat Sukirno, 2013 dalam Primandari (2020) mengatakan pengangguran dapat mengurangi pendapatan yang membuat masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya termasuk pendidikan, kesehatan dan sudah tentu akan menurunkan daya beli sehingga tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat akan menurun. Dengan demikian, hipotesis 7a yang menyatakan bahwa Pengangguran berpengaruh positif terhadap IPM diterima. Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel adalah 0,510 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) nilai  $t_{hitung} = -0,663 < t_{tabel} = 1,671$ , yang berarti Pengangguran tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal. Pengangguran tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan alokasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, hipotesis 7b yang menyatakan bahwa Pengangguran berpengaruh positif terhadap belanja modal ditolak. Pada uji sobel nilai  $z_{hitung}$  yaitu 0.632 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak mengintervensi pengaruh Pengangguran terhadap IPM. Wahyuni 2005 dalam Kiha dkk. (2021) mengatakan bahwa tingkat pengangguran merupakan keadaan seseorang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan guna memperoleh pendapatan. Ketika tingkat pengangguran meningkat maka indeks hidup layak suatu masyarakat meningkat maka perusahaan-perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja lebih sehingga tingkat indeks hidup layak para pekerja akan meningkat sehingga akan mengurangi Indeks Pembangunan Manusia. Namun dari hasil penelitian menunjukkan tidak adanya dampak dari belanja modal terhadap hubungan Pengangguran dengan IPM karena pengangguran memiliki dampak signifikan secara langsung dan cepat mempengaruhi pembangunan manusia. Dengan demikian, hipotesis 7c yang

menyatakan bahwa belanja modal mengintervensi Pengangguran terhadap IPM ditolak.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hanya PAD dan Pengangguran berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Namun DAU, DAK, DBH, SiLPA, Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM. DAK, DBH, Kemiskinan justru berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal dan PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja modal, DAU SiLPA, Pengangguran tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja modal serta Belanja Modal tidak mengintervensi seluruh variabel penelitian terhadap IPM. Sehingga seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan upaya peningkatan IPM ini baik dari melalui belanja modal maupun alokasi dana lainnya. Mengingat Belanja Modal memberikan manfaat jangka panjang bagi publik melalui pembangunan sarana dan prasarana di sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan sehingga indikator IPM Sumatera Selatan dapat ikut meningkat dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan beberapa variabel independen yang lain terkait IPM seperti Dana Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi dan lain-lain, populasi daerah yang diteliti dapat diperluas bukan hanya provinsi Sumatera Selatan dengan periode pengamatan yang lebih panjang agar lebih akurat dalam membandingkan hasil penelitian dari tahun ke tahun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiputra, I. M. P., Dwiyantari, N. K. D., & Darmada, D. K. (2015). Pengaruh PAD , Dana Perimbangan dan SiLPA terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali). *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Afif, A. N., & Yulianti, Y. (2019). Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Indonesia Timur (Studi kasus Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Papua pada tahun 2013-2016). *Solusi*, 16(4), 181–210.
- Amalia, A. F. N., & Haryanto. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di

- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Dewi, N. (2017). Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 870–882.
- Fahri, Jalil, A., & Kasnelly, S. (2020). *Meningkatnya Angka Pengangguran di tengah Pandemi (Covid-19)*. 2(pengangguran akibat covid 19), 45–60.
- Fathia, P. B., & Dedi Rusdi, SE., M.Si., Ak., C. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*.
- Frete, P. N. De. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 2(2), 1–33.
- Heliyanto, F., & Handayani, N. (2016). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* :, 5(3), 1–17.
- Indiyanti, N. M. D., & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(9), 4713.
- Kiha, E. K., Seran, S., & Lau, H. T. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07), 60–84.
- Komariah, D., Yogiartoro, M., & Hukom, A. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(S1), 523–532.
- Kurniasari, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–25.
- Melgiana, A. C., Rupa, I. W., & Riasning, N. P. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 45–49.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212.
- Novriansyah, M. A. (2018). Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 59–73.
- Patadang, T. M., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Minahasa Tenggara dengan Pengeluaran di Bidang Kesehatan sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pembangunan*

- Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(2), 132–149.
- Primandari, N. R. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2004 – 2018. *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2(2), 25.
- Raviyanti, A. A., Rahayu, S., & Mahardika, D. P. K. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2009 - 2013). *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 243–256.
- Risdiana, F. Y. (2020). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Perempuan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 257–270.
- Sinuraya, M. B. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Kemiskinan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM di Provinsi Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 217–223.
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 1.
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 514–526.
- Talangamin, O. B., Kindangen, P. ., & Koleangan, R. A. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(7), 1–11.
- Verawaty, Gunarto, M., Wahasusmiah, R., & Merina, C. I. (2021). *Determinants of human development index in Indonesia*.
- Verawaty, Wahasusmiah, R., & Amnah. (2020). *Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Alokasi Belanja Modal*.
- Wahyu, I. P. A., & Dwirandra, A. A. N. . (2015). Kemampuan Belanja Modal Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, DAK dan SiLPA pada IPM. *E-Jurnal Akuntansi*, 12(3), 546–565.
- Wertianti, I. G. A. G., & Dwirandra, A. A. N. . (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad Dan Dau Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(3), 567–584.
- Adiputra, I. M. P., Dwiyantari, N. K. D., & Darmada, D. K. (2015). Pengaruh PAD , Dana Perimbangan dan SiLPA terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali). *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Afif, A. N., & Yulianti, Y. (2019). Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Indonesia Timur (Studi kasus Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Papua pada tahun 2013-2016). *Solusi*, 16(4), 181–210.
- Amalia, A. F. N., & Haryanto. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di

- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Dewi, N. (2017). Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 870–882.
- Fahri, Jalil, A., & Kasnelly, S. (2020). *Meningkatnya Angka Pengangguran di tengah Pandemi (Covid-19)*. 2(pengangguran akibat covid 19), 45–60.
- Fathia, P. B., & Dedi Rusdi, SE., M.Si., Ak., C. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*.
- Frete, P. N. De. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 2(2), 1–33.
- Heliyanto, F., & Handayani, N. (2016). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* :, 5(3), 1–17.
- Indiyanti, N. M. D., & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(9), 4713.
- Kiha, E. K., Seran, S., & Lau, H. T. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07), 60–84.
- Komariah, D., Yogiartoro, M., & Hukom, A. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(S1), 523–532.
- Kurniasari, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–25.
- Melgiana, A. C., Rupa, I. W., & Riasning, N. P. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 45–49.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212.
- Novriansyah, M. A. (2018). Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 59–73.
- Patadang, T. M., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Minahasa Tenggara dengan Pengeluaran di Bidang Kesehatan sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pembangunan*

- Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(2), 132–149.
- Primandari, N. R. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2004 – 2018. *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2(2), 25.
- Raviyanti, A. A., Rahayu, S., & Mahardika, D. P. K. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2009 - 2013). *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 243–256.
- Risdiana, F. Y. (2020). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Perempuan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 257–270.
- SAP. (2021). *Standar Akuntansi Pemerintahan 2021*.
- Sinuraya, M. B. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Kemiskinan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM di Provinsi Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 217–223.
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 1.
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 514–526.
- Talangamin, O. B., Kindangen, P. ., & Koleangan, R. A. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(7), 1–11.
- Verawaty, Gunarto, M., Wahasusmiah, R., & Merina, C. I. (2021). *Determinants of human development index in Indonesia*.
- Verawaty, Wahasusmiah, R., & Amnah. (2020). *Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Alokasi Belanja Modal*.
- Wahyu, I. P. A., & Dwirandra, A. A. N. . (2015). Kemampuan Belanja Modal Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, DAK dan SiLPA pada IPM. *E-Jurnal Akuntansi*, 12(3), 546–565.
- Wertianti, I. G. A. G., & Dwirandra, A. A. N. . (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad Dan Dau Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(3), 567–584.